



KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL FADLY AMRAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENATAAN KOTA PADANG MODERN

FADLY AMRAN TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP IN DECISION MAKING FOR MODERN PADANG CITY PLANNING

Silvia^{1*}, Ira Yanti Octamiza², Eliza Mohga Elhakim³, Zalatan Muntaharul Ikhran⁴,
Yulia Hanoselina⁵

¹Universitas Negeri Padang, Email: kumpulan373@gmail.com

²Universitas Negeri Padang, Email: octamizairayanti@gmail.com

³Universitas Negeri Padang, Email: elizamohga1975@gmail.com

⁴Universitas Negeri Padang, Email: zalatanazza@gmail.com

⁵Universitas Negeri Padang, Email: yuliahanoselina@fis.unp.ac.id

*email koresponden: kumpulan373@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.62567/ijosse.v2i2.2772>

Abstrack

This study analyzes Fadly Amran's transformational leadership in decision-making for the modern structuring of Padang City. The background of this research is the increasing pressure of global change and the demands of local democratization, which have led to a fundamental transformation in regional government leadership paradigms in Indonesia, particularly in the context of smart city-based urban development. The general objective of this study is to analyze the dimensions of Fadly Amran's transformational leadership and decision-making patterns in the modernization of Padang City. The theoretical framework used includes transformational leadership theory based on Bass and Avolio's Four I's dimensions (idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, and individualized consideration), bounded rationality decision-making theory, and the concept of modern urban governance with a smart city approach. The research method used is a systematic literature review on national and international literature from 2019–2026, with data collection techniques through identification, selection, evaluation, and synthesis of articles from reputable journals obtained from Google Scholar, Garuda, and Semantic Scholar databases. The results of the study indicate that Fadly Amran's transformational leadership influences the effectiveness of urban development decision-making through his ability to develop strategic vision, encourage governance innovation, strengthen cross-sector collaboration, and increase the responsiveness of technology-based public services. The Padang Melayani, Padang Amanah, Padang Rancak, and Jelajah Padang programs demonstrate the integration of city modernization with Minangkabau local wisdom.

Keywords: *transformational leadership; decision-making; modern urban planning; Fadly Amran; Padang City.*



Abstrak

Penelitian ini menganalisis kepemimpinan transformasional Fadly Amran dalam pengambilan keputusan penataan Kota Padang modern. Latar belakang penelitian ini adalah semakin intensifnya tekanan perubahan global dan tuntutan demokratisasi lokal yang mendorong transformasi mendasar dalam paradigma kepemimpinan pemerintahan daerah di Indonesia, khususnya dalam konteks pembangunan perkotaan berbasis smart city. Tujuan umum penelitian ini adalah menganalisis dimensi kepemimpinan transformasional Fadly Amran dan pola pengambilan keputusan dalam modernisasi Kota Padang. Kerangka teori yang digunakan meliputi teori kepemimpinan transformasional berdasarkan dimensi Four I's Bass dan Avolio (idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, dan individualized consideration), teori pengambilan keputusan bounded rationality, serta konsep tata kelola perkotaan modern dengan pendekatan smart city. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review sistematis terhadap literatur nasional dan internasional periode 2022–2026, dengan teknik pengumpulan data melalui proses identifikasi, seleksi, evaluasi, dan sintesis artikel dari jurnal bereputasi yang diperoleh dari basis data Google Scholar, Garuda, dan Semantic Scholar. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional Fadly Amran berpengaruh terhadap efektivitas pengambilan keputusan pembangunan kota melalui kemampuannya membangun visi strategis, mendorong inovasi tata kelola, memperkuat kolaborasi lintas sektor, dan meningkatkan responsivitas pelayanan publik berbasis teknologi. Program Padang Melayani, Padang Amanah, Padang Rancak, dan Jelajah Padang menunjukkan integrasi modernisasi kota dengan kearifan lokal Minangkabau.

Kata Kunci: kepemimpinan transformasional; pengambilan keputusan; tata kota modern; Fadli Amran; Kota Padang.

1. PENDAHULUAN

Era globalisasi yang ditandai dengan cepatnya perubahan teknologi dan meningkatnya kebutuhan akan pemerintahan yang lebih transparan telah menciptakan kebutuhan mendesak akan pemimpin yang bisa beradaptasi dan mengajukan inovasi. Dalam konteks ini, gaya kepemimpinan transformasional yang fokus pada motivasi dari dalam, peningkatan berpikir, dan visi bersama semakin relevan sebagai alat untuk menghadapi tuntutan pemerintahan saat ini. Kepemimpinan yang bisa menghasilkan perubahan sistemik dan berkelanjutan menjadi syarat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang bisa merespons kebutuhan masyarakat (Bass & Avolio, 1994 dalam Harsoyo, 2022).

Di tingkat nasional, Indonesia menghadapi tantangan yang rumit dalam mengelola pemerintahan daerah sejak berlakunya otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-undang tersebut mengubah peran kepala daerah dari seorang administrator birokratis menjadi seorang pemimpin yang memiliki visi jangka panjang. Penelitian-penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional bisa mendorong terciptanya inovasi dalam pengelolaan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat komitmen pegawai dalam mewujudkan birokrasi yang bisa beradaptasi (Amallia et al., 2025 ; Cahaya et al., 2025).

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara berpikir dalam membangun kota modern dengan konsep smart city, yang menggabungkan teknologi digital dalam pengelolaan pemerintahan. Di Indonesia, mengembangkan kota pintar menghadapi tantangan khusus seperti keragaman budaya, kurangnya infrastruktur digital, dan prosedur birokrasi yang



rumit, sehingga peran pemimpin daerah yang memiliki visi jelas dan mampu melakukan perubahan sangat penting (Ardhana, 2024; Sulistyaningsih et al., 2023). Pembangunan kota modern berhasil tidak hanya karena ada teknologi, tetapi juga karena kemampuan pemimpin dalam memandu perubahan organisasi dan membuat kerja sama antar berbagai pihak yang terlibat (Yosua, 2024(Sulistyaningsih et al., 2023).

Penelitian yang secara khusus membahas kepemimpinan transformasional dalam konteks pengembangan kota modern di Sumatra Barat, khususnya di Kota Padang, masih sangat minim (Nugroho & Muslim, 2024). Padahal, Kota Padang sebagai ibu kota provinsi menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, seperti warisan tata ruang setelah gempa 2009, tekanan dari peningkatan jumlah penduduk kota, serta kemacetan yang semakin parah. Selain itu, Kota Padang juga menghadapi kebutuhan mendesak untuk bertransformasi ke arah digital dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Di sisi lain, transformasi tersebut harus tetap menjaga identitas budaya Minangkabau di tengah proses modernisasi yang terus berlangsung

Fenomena kepemimpinan Fadly Amran, yang diangkat menjadi Walikota Padang pada 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto, menunjukkan contoh kepemimpinan dari generasi muda yang patut dipelajari lebih lanjut. Di Kota Padang Panjang dari tahun 2018 hingga 2023, ada beberapa pencapaian penting. Kota tersebut mendapatkan penghargaan Innovative Government Award (IGA) dari Kementerian Dalam Negeri selama tiga tahun beruntun, yaitu pada tahun 2021 hingga 2023. Selain itu, Padang Panjang juga berhasil menjadi daerah pertama di Sumatra Barat yang menerapkan konsep smart city secara menyeluruh. Visi untuk mewujudkan "Padang sebagai Kota Pintar dan Kota Sehat, berlandaskan Agama dan Budaya, menuju Kota yang Maju dan Sejahtera" menunjukkan pendekatan yang menyeluruh. Pendekatan ini menggabungkan inovasi teknologi dengan prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) melalui sembilan program prioritas (Cahaya et al., 2025; Amallia et al., 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan: (1) mengkaji dimensi kepemimpinan transformasional Fadly Amran dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Padang; (2) menganalisis pola pengambilan keputusan dalam penataan kota *modern* berbasis *smart city*; (3) mengidentifikasi dampak, tantangan, dan hambatan implementasi visi penataan kota; serta (4) merumuskan agenda riset ke depan yang relevan secara akademis. Urgensi penelitian ini didukung oleh tiga pertimbangan komplementer: secara teoretis berkontribusi pada pengembangan *body of knowledge* kepemimpinan transformasional dalam pemerintahan daerah Indonesia; secara praktis berpotensi menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan model kepemimpinan adaptif; dan secara kontekstual mengeksplorasi dimensi unik kekhasan budaya Minangkabau yang belum banyak diteliti dalam kaitannya dengan tata kelola perkotaan *modern* (Nugroho & Muslim, 2024; Cahaya et al., 2025; Amallia et al., 2025).

Teori Kepemimpinan Transformasional

Teori kepemimpinan adalah rangkaian gagasan yang menjelaskan cara seorang pemimpin memengaruhi, mengarahkan, dan mendorong individu atau kelompok agar mencapai tujuan organisasi. Teori ini juga memberikan dasar pemahaman tentang hubungan antara pemimpin, pengikut, dan kondisi lingkungan organisasi (Febriantina et al. 2025).



Perkembangan teori kepemimpinan menunjukkan adanya perubahan perspektif dari pendekatan tradisional menuju pendekatan yang lebih modern. Febriantina et al. (2025) mengelompokkan teori kepemimpinan menjadi tiga jenis, yaitu teori sifat yang menekankan karakteristik pribadi seorang pemimpin, teori perilaku yang memperhatikan cara pemimpin berinteraksi dengan bawahan, serta teori situasional yang menekankan kemampuan pemimpin untuk menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai dengan kondisi organisasi, seperti yang dikembangkan oleh Hersey dan Blanchard.

Dengan semakin rumitnya struktur organisasi saat ini, muncul teori kepemimpinan transformasional yang fokus pada perubahan, kreativitas, dan peningkatan kemampuan serta potensi karyawan. Pemimpin transformasional tidak hanya fokus pada pencapaian tujuan, tetapi juga berusaha menciptakan perubahan yang baik dan terus-menerus berkat visi yang jelas serta kemampuan untuk menginspirasi orang-orang yang mengikutinya (Febriantina et al., 2025). Avolio dkk (dalam Harsoyo, 2022) menyatakan bahwa pemimpin transformasional memiliki kemampuan untuk bersikap visioner, memberi inspirasi, memiliki kekharismanan, serta mampu menyelaraskan visi organisasi dengan visi individu di bawahnya, sehingga terbentuknya komitmen bersama.

Bass dan Avolio (dalam Harsoyo, 2022) mengidentifikasi empat aspek utama dari kepemimpinan transformasional yang disebut *The Four I's*. Dimensi pertama adalah *idealized influence* atau pengaruh ideal, kemampuan memimpin dengan teladan yang membangun rasa hormat dan kepercayaan. Dimensi kedua, *inspirational motivation* atau motivasi inspiratif, yaitu kemampuan membangkitkan semangat dengan menyampaikan visi yang jelas dan menantang. Dimensi ketiga adalah *intellectual stimulation* atau stimulasi intelektual, yaitu kemampuan mendorong bawahan untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Terakhir, *individualized consideration* atau perhatian individual yaitu perhatian terhadap kebutuhan dan pertumbuhan personal setiap bawahan. Dalam bidang pemerintahan, kepemimpinan transformasional sangat penting untuk mendorong inovasi dalam pelayanan publik, mengubah cara kerja birokrasi, serta membentuk lingkungan kerja yang profesional, bisa beradaptasi, dan fokus pada kebutuhan masyarakat, sehingga menjadi cara yang tepat untuk menghadapi tantangan dalam mengelola pemerintahan modern.

Konsep Pengambilan Keputusan

Proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup identifikasi masalah, pengumpulan informasi, penilaian alternatif, hingga penetapan kebijakan yang dianggap paling tepat. Herbert Simon melalui konsep *bounded rationality* menjelaskan bahwa pengambil keputusan memiliki keterbatasan dalam mengolah informasi secara sempurna sehingga keputusan yang dihasilkan sering kali bersifat satisficing atau cukup memuaskan, bukan yang paling optimal. Kondisi ini semakin relevan dalam pemerintahan daerah yang dihadapkan pada keterbatasan sumber daya dan kompleksitas persoalan publik. Oleh karena itu, pengambilan keputusan sering dilakukan berdasarkan informasi yang tersedia dan pertimbangan yang paling rasional pada saat tertentu (Salsabila et al., 2024).



Kualitas pengambilan keputusan dalam pemerintahan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti karakteristik pemimpin, kekuatan kelembagaan, kondisi lingkungan eksternal, serta ketersediaan informasi dan teknologi. Dalam konteks ini, kepemimpinan transformasional memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang inovatif, kolaboratif, dan partisipatif. Pemimpin transformasional mendorong aparatur untuk terlibat aktif dalam perumusan kebijakan serta berani mengembangkan pendekatan baru dalam menyelesaikan masalah publik. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada perubahan jangka panjang (Amallia et al., 2025; Cahaya et al., 2025).

Perkembangan teknologi digital juga membawa perubahan signifikan dalam proses pengambilan keputusan sektor publik. Pemanfaatan *big data*, kecerdasan buatan, dan teknologi analitik memungkinkan pemerintah memperoleh informasi yang lebih cepat, akurat, dan berbasis bukti. Meskipun demikian, teknologi tidak sepenuhnya menghilangkan keterbatasan manusia dalam mengambil keputusan, melainkan berfungsi sebagai alat pendukung untuk meningkatkan kualitas analisis kebijakan. Oleh sebab itu, pemimpin daerah dituntut mampu memanfaatkan teknologi secara efektif sekaligus mengelola perubahan organisasi yang dinamis dan penuh ketidakpastian (Amallia et al., 2025; Yosua, 2024).

Integrasi antara kepemimpinan transformasional dan pengambilan keputusan berbasis data menjadi elemen penting dalam tata kelola pemerintahan modern. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih inovatif, responsif, dan akuntabel terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, penggunaan data yang akurat membantu pemimpin menentukan prioritas pembangunan secara lebih tepat sasaran dan efisien. Dengan demikian, sinergi antara kepemimpinan transformasional dan teknologi informasi dapat mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang efektif serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas (Salsabila et al., 2024; Amallia et al., 2025).

Konsep Tata Kota Modern

Konsep tata kota *modern* berkembang sebagai respons terhadap urbanisasi, pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, dan tuntutan kualitas layanan publik. Saat ini, tata kota tidak lagi sekadar pengaturan ruang fisik, tetapi merupakan sistem pengelolaan perkotaan terintegrasi yang menggabungkan teknologi, tata kelola, pembangunan berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat. Pendekatan *smart city* menjadi pengaruh utama, dengan teknologi informasi sebagai sarana untuk menciptakan kota yang adaptif dan berkelanjutan. Menurut Ardhana (2024), kota modern dibangun melalui enam dimensi: *smart governance*, *smart economy*, *smart mobility*, *smart environment*, *smart people*, dan *smart living*. Sulistyaningsih et al (2023) menekankan perlunya *smart urban governance* yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Rambe & Abdurrahman (2026) menyatakan bahwa modernisasi perkotaan harus disinkronkan dengan Rencana Induk *Smart City*, RTRW, dan dokumen perencanaan daerah.

Selain itu, tata kota *modern* juga mengedepankan pembangunan berkelanjutan (efisiensi sumber daya, ruang terbuka hijau, mitigasi dampak lingkungan), partisipasi masyarakat melalui *collaborative governance*, serta pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven decision making*) yang terintegrasi. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, tata kota



modern juga harus menciptakan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap generasi mendatang. Oleh karena itu, konsep *compact city*, *eco-city*, dan *urban sustainability* menjadi elemen-elemen penting yang saling berkaitan dalam membentuk kota yang efisien, ramah lingkungan, dan berorientasi pada kualitas hidup masyarakat secara jangka panjang. Pendekatan ini semakin penting mengingat meningkatnya tantangan perubahan iklim, polusi lingkungan, dan tekanan urbanisasi di berbagai kota besar. Pemerintah kota dituntut mampu mengembangkan sistem informasi terintegrasi sehingga berbagai data kependudukan, transportasi, lingkungan, pelayanan publik, dan kondisi sosial ekonomi dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran, sehingga memungkinkan pemerintah merespons permasalahan perkotaan secara lebih cepat, akurat, dan efisien.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode literature review sistematis (*Systematic Literature Review/SLR*) sebagai pendekatan metodologis utama. *Literature review* merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian guna membangun pemahaman teoritis yang komprehensif serta menemukan celah penelitian yang memerlukan kajian lebih lanjut (Irwansyah, 2024). Metode ini dipilih karena mampu mengintegrasikan berbagai temuan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kepemimpinan transformasional, *smart city*, dan tata kelola pemerintahan daerah untuk kemudian dianalisis secara kritis dalam konteks spesifik kepemimpinan Fadly Amran di Kota Padang. Pendekatan *literatur review* juga memungkinkan peneliti untuk memetakan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang yang dikaji sekaligus mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang ada.

Sumber utama penelitian ini terdiri atas delapan artikel ilmiah bereputasi yang diperoleh melalui tiga basis data akademik utama, yaitu Google Scholar, Garuda (Garba Rujukan Digital), dan Semantic Scholar, dengan rentang waktu publikasi dari tahun 2022 hingga 2026. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui empat tahapan utama: pertama, tahap identifikasi dengan menentukan kata kunci pencarian yang relevan seperti kepemimpinan transformasional, *smart city*, pengambilan keputusan, tata kota *modern*, dan Fadly Amran. Kedua, tahap seleksi awal berdasarkan kesesuaian judul dan abstrak dengan fokus penelitian; ketiga, tahap evaluasi mendalam terhadap metodologi, temuan, dan kualitas argumen setiap artikel yang telah terseleksi; dan keempat, tahap sintesis untuk mengintegrasikan temuan-temuan yang relevan dari berbagai sumber secara koheren dan sistematis.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis konten (*content analysis*) dan analisis komparatif terhadap *literatur* yang telah dikumpulkan. Analisis konten dilakukan dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama, konsep-konsep kunci, dan temuan-temuan signifikan dari setiap artikel yang dikaji, kemudian memetakannya dalam kerangka teoritis kepemimpinan transformasional berdasarkan dimensi *Four I's* Bass dan Avolio (dalam Harsoyo, 2022). Analisis komparatif dilakukan untuk membandingkan berbagai perspektif dan



temuan dari sumber-sumber yang berbeda guna menghasilkan sintesis yang komprehensif dan berimbang. Panduan PRISMA 2020 dijadikan sebagai pedoman sistematis dalam proses seleksi dan pelaporan literature review agar penelitian berlangsung lebih transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Proses seleksi ini juga mengutamakan artikel-artikel dari jurnal yang memiliki proses *peer-review* yang ketat sebagai jaminan kualitas ilmiah dari sumber-sumber yang digunakan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Singkat Fadly Amran

Fadly Amran, bergelar Datuak Paduko Malano, lahir di Kota Padang pada 9 Februari 1988. Ia merupakan putra dari (Alm) H. Amran Sutan Sidi Sulaiman, seorang pengusaha Muhammadiyah sekaligus pendiri Yayasan Pendidikan Baiturrahmah, dan Hj. Maizarnis. Latar belakang keluarga pengusaha yang berpandangan maju serta pengalaman pendidikan tinggi di Amerika Serikat yaitu *Associate of Arts & Science di Shoreline Community College (2005–2007)* dan *Bachelor of Business Administration di Seattle University (2007–2009)* telah membentuk orientasi kepemimpinannya yang visioner, inovatif, dan berwawasan global (Pemerintah Kota Padang, 2024). Kombinasi antara latar belakang keluarga yang berlatar pendidikan dan kewirausahaan dengan pengalaman internasional tersebut memberikan Fadly Amran perspektif yang luas dalam memandang tantangan pembangunan perkotaan di Indonesia.

Rekam jejak kepemimpinan Fadly Amran sangat kaya dan terbangun secara sistematis sejak usia muda melalui keterlibatan aktif dalam berbagai organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan. Ia pernah menjabat sebagai Ketua HIPMI Kota Padang (2012–2015), Ketua KNPI Kota Padang (2015–2018), dan Ketua KNPI Sumatera Barat (2018–2021), yang semuanya memperkaya kemampuannya dalam membangun jejaring, memimpin organisasi, dan mengelola kepentingan berbagai pihak secara demokratis. Pada tahun 2018, pada usia 30 tahun, ia terpilih sebagai Walikota Padang Panjang, mengalahkan walikota petahana dan menjalankan 29 program unggulan dengan visi “Kota Padang Panjang yang Bermartabat”. Keberhasilannya selama memimpin Padang Panjang mencakup perolehan penghargaan Innovative Government Award (IGA) dari Kemendagri tiga kali berturut-turut (2021–2023), pengembangan Smart City pertama di Sumatera Barat, perolehan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, serta berbagai penghargaan di bidang lingkungan, tata kelola, dan digitalisasi (Pemerintah Kota Padang, 2024).

Pada Pilkada Kota Padang tahun 2024, Fadly Amran berpasangan dengan Maigus Nasir meraih kemenangan signifikan dengan perolehan 176.648 suara atau 55,17% dari total suara, dan resmi dilantik sebagai Walikota Padang oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025. Dengan pelantikan tersebut, ia menjadi Walikota Padang termuda kedua sepanjang sejarah kota ini, membawa modal kepemimpinan yang telah teruji dan jaringan kelembagaan yang luas untuk mewujudkan visi Padang sebagai kota modern bercirikan nilai Minangkabau. Pengalaman dan rekam jejaknya yang komprehensif tersebut menjadikan kepemimpinan Fadly Amran sebagai subjek yang sangat relevan dan menarik untuk dikaji dalam perspektif



kepemimpinan transformasional, khususnya dalam konteks modernisasi tata kelola perkotaan di Indonesia. Keberhasilannya di Padang Panjang memberikan bukti empiris bahwa pendekatan transformasional yang diterapkan secara konsisten mampu menghasilkan perubahan yang nyata dan terukur dalam kualitas pemerintahan daerah.

Kepemimpinan Transformasional Fadly Amran

Kepemimpinan transformasional Fadly Amran dapat dilihat melalui upayanya membangun Kota Padang sebagai kota modern berbasis *smart city* dan *smart governance*. Berdasarkan teori Bass dan Avolio (1994) (dalam Harsoyo, 2022), kepemimpinan transformasional terdiri dari empat dimensi, yaitu *idealized influence*, *inspirational motivation*, *intellectual stimulation*, dan *individualized consideration*. Keempat dimensi tersebut tampak sangat selaras dengan arah pembangunan kota modern yang menekankan integrasi antara inovasi teknologi, reformasi birokrasi, partisipasi masyarakat, dan pelestarian nilai budaya lokal. Dalam konteks Kota Padang, Fadly Amran menunjukkan karakteristik pemimpin transformasional yang mampu mengartikulasikan visi yang jelas, memotivasi aparatur dan masyarakat, mendorong inovasi, serta memberikan perhatian personal terhadap kebutuhan berbagai kelompok pemangku kepentingan.

Dimensi *idealized influence* terlihat melalui komitmen kuat Fadly Amran terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada pelayanan prima, yang diwujudkan secara konkret melalui program “Padang Amanah”. Program ini mencerminkan upaya untuk membangun birokrasi yang bersih, akuntabel, dan dapat dipercaya oleh masyarakat, sehingga menumbuhkan rasa hormat dan kepercayaan aparatur maupun warga terhadap kepemimpinannya. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian Sulistyaningsih et al. (2023) yang menegaskan bahwa implementasi smart urban governance harus dimulai dari kebijakan yang terintegrasi, konsisten, dan berorientasi pada kepentingan publik secara nyata. Dengan demikian, modernisasi kota tidak hanya dipahami sebagai pembangunan fisik dan digitalisasi semata, tetapi juga sebagai reformasi tata kelola pemerintahan yang mendasar dan sistemik. Rekam jejak Fadly Amran yang bersih dan prestasi yang terukur selama memimpin Padang Panjang memperkuat posisinya sebagai figur yang dapat diteladani dan dipercaya oleh aparatur pemerintah maupun masyarakat Kota Padang.

Dimensi *inspirational motivation* tercermin dalam visi besar yang dicanangkan Fadly Amran, yaitu 'Padang sebagai Kota Pintar (Smart City) dan Kota Sehat, berlandaskan Agama dan Budaya, menuju Kota yang Maju dan Sejahtera'. Visi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kota modern diarahkan tidak hanya pada kemajuan teknologi dan infrastruktur fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara holistik dan penguatan identitas lokal yang menjadi ciri khas Minangkabau. Kemampuan Fadly Amran dalam mengkomunikasikan visi ini secara konsisten dan membumi, dengan mengaitkannya langsung dengan nilai-nilai yang dipahami dan dihargai oleh masyarakat Padang, menjadikan visi tersebut bukan sekadar slogan abstrak melainkan aspirasi kolektif yang mampu menggerakkan energi dan komitmen seluruh komponen masyarakat. Hal ini sesuai dengan penelitian Rambe & Abdurrahman, (2026) yang menjelaskan bahwa smart city merupakan pendekatan



pembangunan kota yang adaptif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Pada dimensi *intellectual stimulation*, Fadly Amran mendorong inovasi pelayanan publik secara konkret melalui digitalisasi administrasi pemerintahan, pengembangan command center yang terintegrasi, dan pemanfaatan berbagai layanan berbasis teknologi yang memudahkan akses masyarakat terhadap layanan pemerintah. Pendekatan ini merangsang aparatur untuk berpikir kreatif dalam mencari solusi bagi permasalahan perkotaan yang kompleks dan mendorong mereka untuk tidak terpaku pada prosedur birokrasi konvensional yang kaku. Pendekatan tersebut selaras dengan konsep *technological urbanism* dalam penelitian Sulistyaningsih et al., (2023) yang menekankan pentingnya integrasi teknologi dalam tata kelola kota modern sebagai instrumen untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik secara berkesinambungan. Selain itu, Fadly Amran juga aktif mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru dalam sistem administrasi pemerintahan, dengan menciptakan iklim organisasi yang toleran terhadap eksperimen dan pembelajaran dari kegagalan sebagaimana dibuktikan oleh penghargaan IGA yang diraihnya berturut-turut selama memimpin Padang Panjang.

Sementara itu, dimensi *individualized consideration* tampak melalui pendekatan kepemimpinan Fadly Amran yang dekat dan responsif terhadap berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelaku UMKM melalui program 'UMKM Naik Kelas', komunitas keagamaan melalui program 'Smart Surau', hingga masyarakat nagari melalui program 'Sinergi Nagari'. Keterlibatan langsung Fadly Amran dalam mendengar dan memahami kebutuhan warga dari berbagai segmen sosial mencerminkan kemampuannya membangun koneksi personal yang autentik dan bermakna dengan konstituennya. Pendekatan ini memiliki kesamaan dengan model pembangunan smart city berbasis partisipasi masyarakat yang dijelaskan oleh Rambe & Abdurrahman, (2026), bahwa keberhasilan kota cerdas tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga kolaborasi dan keterlibatan masyarakat. Secara keseluruhan, kepemimpinan transformasional Fadly Amran memiliki keselarasan dengan konsep smart city dan smart urban governance dalam ketiga artikel tersebut, terutama pada aspek inovasi teknologi, reformasi pelayanan publik, pembangunan berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat. Perbedaannya terletak pada pendekatan Fadly Amran yang lebih menekankan integrasi modernisasi kota dengan nilai budaya dan religius masyarakat Minangkabau, sehingga pembangunan kota modern tidak kehilangan identitas lokalnya.

Dari perspektif tata kelola pemerintahan, kepemimpinan transformasional tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perubahan organisasi, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memperkuat legitimasi pemerintahan di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Pemimpin transformasional berperan membangun kepercayaan publik melalui kemampuan mengartikulasikan arah pembangunan yang jelas, menciptakan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, serta menghubungkan tujuan organisasi dengan kepentingan masyarakat secara lebih luas. Dalam konteks ini, kepemimpinan Fadly Amran dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi terhadap paradigma pemerintahan modern yang menempatkan pemerintah bukan lagi sebagai aktor tunggal pembangunan, melainkan sebagai



fasilitator yang mampu mengintegrasikan berbagai kepentingan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Pendekatan tersebut sejalan dengan studi perkembangan kepemimpinan sektor publik yang menekankan pentingnya kolaborasi, inovasi, dan kemampuan adaptif sebagai karakter utama pemimpin pemerintahan kontemporer (Cahaya et al., 2025; Nugroho & Muslim, 2024; Febriantina et al., 2025).

Pengambilan Keputusan Dalam Penataan Kota Padang Modern

Proses pengambilan keputusan dalam penataan Kota Padang di bawah kepemimpinan Fadly Amran dapat dianalisis melalui dua kerangka teori utama yang saling melengkapi, yaitu teori kepemimpinan transformasional Bass dan Avolio (dalam Harsoyo 2022), dan teori *bounded rationality* Herbert Simon (dalam Salsabila et al., 2024) Kedua kerangka ini membantu menjelaskan bagaimana seorang pemimpin daerah merumuskan dan mengeksekusi keputusan strategis di tengah kompleksitas persoalan perkotaan yang tidak sederhana. Merujuk pada teori *bounded rationality* Herbert Simon (dalam Salsabila et al., 2024), pengambil keputusan tidak pernah memiliki informasi yang lengkap dan sempurna, sehingga keputusan yang dihasilkan bersifat *satisficing*, cukup memuaskan berdasarkan informasi yang tersedia pada saat tertentu. Kondisi ini sangat relevan dengan situasi Kota Padang yang menghadapi keterbatasan sumber daya sekaligus kompleksitas persoalan publik yang berlapis. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, pemerintah Kota Padang memperkuat sistem tata kelola berbasis teknologi melalui pendekatan *smart governance*, yang memungkinkan pengelolaan data lebih efektif dan akurat sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih berkualitas (dalam Salsabila et al., 2024; Amallia et al., 2025)

Dari perspektif kepemimpinan transformasional, pola pengambilan keputusan Fadly Amran mencerminkan dimensi *inspirational motivation* dan *intellectual stimulation* (Bass dan Avolio dalam Harsoyo 2022). Dimensi *inspirational motivation* tampak pada langkah strategis penyelarasan sembilan program prioritas dengan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setelah pelantikan, yang menunjukkan bahwa visi pemimpin diinstitutionalisasi ke dalam kapasitas birokrasi secara terencana namun tetap fleksibel. Sementara dimensi *intellectual stimulation* terwujud melalui dorongan digitalisasi administrasi pemerintahan, pengembangan *command center* terintegrasi, dan pemanfaatan layanan berbasis teknologi yang mendorong aparatur berpikir kreatif dalam mencari solusi atas permasalahan perkotaan yang kompleks (Cahaya et al., 2025; Amallia et al., 2025). Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan mencerminkan dimensi *individualized consideration* dalam kepemimpinan transformasional (Bass & Avolio dalam Harsoyo, 2022). Pelibatan pelaku UMKM, komunitas surau, hingga masyarakat nagari tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk memperkaya basis informasi pengambilan Keputusan, sehingga keterbatasan *bounded rationality* dapat dikurangi, tetapi juga sebagai mekanisme legitimasi kebijakan yang memperkuat penerimaan masyarakat. Hal ini selaras dengan konsep *smart urban governance* yang menekankan pentingnya tata kelola yang transparan, partisipatif, dan akuntabel (Sulistyaningsih et al., 2023), sekaligus dengan prinsip bahwa keberhasilan kota cerdas tidak hanya bergantung pada teknologi tetapi juga pada kolaborasi dan keterlibatan masyarakat (Rambe & Abdurrahman, 2026).



Pada dimensi eksternal, kebijakan Fadly Amran untuk membangun koordinasi aktif dengan pemerintah pusat mencerminkan dimensi *idealized influence* yang melampaui batas internal organisasi. Kemampuan pemimpin dalam mengelola hubungan eksternal ini merupakan bagian penting dari strategi pengambilan keputusan publik, sebab keberhasilan penataan kota modern mensyaratkan sinkronisasi kebijakan antar-tingkatan pemerintahan (Sulistyaningsih et al., 2023); Amallia et al., 2025). Temuan analisis bibliometrik juga menegaskan bahwa model kepemimpinan yang adaptif, kolaboratif, dan inovatif semakin dominan dalam praktik pemerintahan modern dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks (Nugroho & Muslim, 2024). Secara keseluruhan, pola pengambilan keputusan dalam penataan Kota Padang merupakan integrasi antara kepemimpinan transformasional dan *bounded rationality*: visi strategis mengarahkan tujuan, teknologi memperluas kapasitas analisis, partisipasi publik memperkaya informasi, dan kolaborasi lintas sektor memperkuat implementasi. Sinergi keempat elemen ini menghasilkan keputusan yang lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan publik jangka panjang sebagaimana dituntut oleh paradigma tata kelola perkotaan modern (Rambe & Abdurrahman, 2026); Salsabila et al., 2024; Sulistyaningsih et al., 2023).

Dampak Penataan Kota Padang

Penataan Kota Padang melalui pendekatan *smart city* secara substansial mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih modern, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dampak tersebut paling nyata terlihat dalam tiga dimensi utama: digitalisasi layanan publik, peningkatan efisiensi birokrasi, dan penguatan sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi. Dalam perspektif tata kota *modern*, kondisi ini mencerminkan penerapan prinsip *smart governance* yang menekankan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola perkotaan (Ardhana, 2024; Sulistyaningsih et al., 2023). Kepemimpinan transformasional Fadly Amran berperan krusial dalam proses ini karena pemimpin transformasional tidak sekadar merespons perubahan, melainkan secara aktif membangun kapasitas organisasi untuk mengantisipasinya secara strategis. Perubahan tersebut juga menunjukkan kemampuan pemimpin dalam mendorong inovasi dan adaptasi organisasi terhadap perkembangan zaman, sehingga modernisasi tata kelola Kota Padang tidak semata-mata bersifat teknis, melainkan mencerminkan transformasi nilai dan orientasi kelembagaan yang lebih mendasar.

Program Padang Melayani dan Padang Amanah berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui layanan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat, sejalan dengan konsep *smart governance* yang menempatkan teknologi sebagai sarana menciptakan pelayanan yang efektif dan akuntabel (Sulistyaningsih et al., 2023). Dari perspektif kepemimpinan transformasional, keberhasilan kedua program ini mencerminkan kemampuan Fadly Amran dalam mendorong perubahan serta membangun komitmen aparatur untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, sehingga modernisasi pelayanan publik dapat mendukung peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Pada aspek ekonomi, program UMKM Naik Kelas dan Jelajah Padang menunjukkan upaya pemerintah dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal melalui



pemanfaatan teknologi digital yang membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar. Kondisi ini sejalan dengan konsep smart economy yang menekankan peran inovasi dan teknologi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan (Rambe & Abdurrahman, 2026). sekaligus menunjukkan kemampuan pemimpin dalam mendorong perubahan ekonomi yang lebih inklusif dan adaptif. Secara kritis, efektivitas program-program ini belum sepenuhnya dapat diukur tanpa data evaluasi yang sistematis, mengingat pelayanan digital yang tidak diiringi strategi inklusi digital berisiko hanya menggeser, bukan menyelesaikan, ketimpangan akses yang ada.

Penerapan smart city juga berpotensi meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pemerintah daerah melalui pemanfaatan data dan teknologi informasi, di mana ketersediaan informasi yang lebih akurat memungkinkan pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif. Temuan ini sesuai dengan teori pengambilan keputusan Herbert Simon yang menjelaskan bahwa informasi yang memadai dapat membantu mengurangi keterbatasan rasionalitas dalam proses pengambilan keputusan (Salsabila et al., 2024). sehingga penggunaan data menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif. Selain itu, pembangunan Kota Padang mendorong terciptanya kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta, yang mencerminkan prinsip partisipatif dalam tata kota modern yang mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan (Sulistyaningsih et al., 2023). Dari perspektif kepemimpinan transformasional, kondisi ini menunjukkan kemampuan pemimpin dalam membangun visi bersama dan memperkuat kerja sama untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, sekaligus meningkatkan efektivitas penyelesaian berbagai persoalan perkotaan.

Program Smart Surau dan Sinergi Nagari menunjukkan bahwa modernisasi Kota Padang tidak hanya berorientasi pada teknologi dan ekonomi, tetapi juga pada penguatan nilai sosial, budaya, dan religius masyarakat. Integrasi antara inovasi dan kearifan lokal mencerminkan upaya menjaga identitas budaya Minangkabau di tengah perkembangan kota modern, dan dalam perspektif kepemimpinan transformasional, hal ini menunjukkan kemampuan pemimpin membangun visi pembangunan yang mampu diterima oleh berbagai kelompok masyarakat (Harsoyo, 2022). Pendekatan ini relevan dengan konsep place-based smart city yang menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital perkotaan ditentukan oleh kemampuan mengintegrasikan inovasi teknologi dengan konteks sosial-budaya lokal, bukan sekadar mengadopsi model generik dari kota lain. Meskipun demikian, keberhasilan program-program tersebut masih memerlukan evaluasi lebih lanjut karena sebagian kebijakan masih berada pada tahap awal pelaksanaan (Cahaya et al., 2025), sehingga penilaian dampak secara komprehensif membutuhkan data longitudinal yang belum tersedia.

Tantangan dan Hambatan

Kepemimpinan transformasional dalam pemerintahan daerah menghadapi tantangan utama berupa kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur dalam mendukung reformasi birokrasi berbasis digital. Tidak seluruh aparaturnya memiliki kemampuan adaptasi yang sama terhadap perubahan teknologi, sehingga diperlukan pelatihan, penguatan kompetensi, dan perubahan budaya kerja yang berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi dan



sistem informasi juga dapat menghambat efektivitas pelayanan publik berbasis digital. Keberhasilan transformasi tidak hanya bergantung pada kualitas pemimpin, tetapi juga pada kesiapan organisasi dan dukungan birokrasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, sinergi antara kepemimpinan, sumber daya manusia, dan teknologi menjadi faktor penting dalam keberhasilan reformasi pelayanan publik (Amallia et al., 2025).

Tantangan berikutnya berkaitan dengan kompleksitas koordinasi birokrasi dan resistensi terhadap perubahan budaya organisasi. Pelaksanaan kebijakan di pemerintahan daerah melibatkan berbagai instansi sehingga membutuhkan komunikasi dan kolaborasi yang efektif agar inovasi dapat berjalan optimal. Namun, budaya birokrasi yang masih berorientasi pada hierarki dan prosedur yang kaku sering kali menimbulkan resistensi terhadap perubahan yang dibawa oleh pemimpin transformasional. Kondisi tersebut diperparah oleh rendahnya kompetensi digital sebagian aparatur dan belum optimalnya kepemimpinan digital di lingkungan birokrasi. Karena itu, pengembangan budaya inovatif, pola pikir digital, dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kebutuhan penting dalam proses transformasi pemerintahan modern (Cahaya et al., 2025; Hanifah & Frinaldi, 2025).

Selain faktor internal organisasi, keterbatasan anggaran serta lemahnya sistem pengawasan juga menjadi hambatan dalam penerapan kepemimpinan transformasional. Berbagai program inovasi membutuhkan investasi yang cukup besar untuk pengadaan teknologi, peningkatan kapasitas aparatur, dan pengembangan fasilitas pelayanan publik. Di sisi lain, ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat sering membatasi ruang gerak dalam mewujudkan agenda transformasi secara berkelanjutan. Kurangnya sistem evaluasi dan pengawasan yang efektif juga berpotensi mengurangi akuntabilitas serta membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program. Oleh sebab itu, penguatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat perlu dilakukan agar transformasi birokrasi dapat menghasilkan pelayanan publik yang lebih berkualitas dan berkelanjutan (Nawawi & Setiawan, 2022 dalam Arisrianto & Santosa, 2025).

4. KESIMPULAN

Kepemimpinan transformasional Fadly Amran dalam pengambilan keputusan penataan Kota Padang modern mencerminkan penerapan empat dimensi The Four I's secara terintegrasi dan konsisten. Dimensi idealized influence terwujud melalui program Padang Amanah yang berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas pemerintahan; dimensi inspirational motivation tercermin dalam visi Padang sebagai Kota Pintar yang mengintegrasikan modernitas dengan nilai Minangkabau; dimensi intellectual stimulation tampak pada dorongan inovasi digitalisasi pelayanan publik dan pengembangan smart governance; serta dimensi individualized consideration terwujud melalui program pemberdayaan UMKM, Smart Surau, dan Sinergi Nagari yang menyentuh kebutuhan spesifik berbagai lapisan masyarakat. Keempat dimensi tersebut berinteraksi secara sinergis untuk menciptakan kepemimpinan yang efektif dalam mendorong transformasi tata kelola perkotaan yang modern, inklusif, dan beridentitas budaya lokal yang kuat.



Pola pengambilan keputusan yang diterapkan dalam penataan Kota Padang mencerminkan integrasi antara pendekatan transformasional dan teori bounded rationality, di mana keterbatasan informasi dan kompleksitas permasalahan publik diatasi melalui penguatan smart governance, pengembangan kolaborasi lintas sektor, dan pemanfaatan teknologi digital sebagai instrumen pendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan berbasis bukti. Penerapan konsep smart city yang tidak sekadar berdimensi teknologi tetapi juga mengintegrasikan nilai budaya dan kearifan lokal Minangkabau menjadikan model kepemimpinan Fadly Amran sebagai contoh yang unik dan relevan bagi pengembangan kajian tata kelola perkotaan di Indonesia, khususnya untuk daerah-daerah yang memiliki kekayaan budaya lokal yang perlu dipreservasi dalam proses modernisasi. Dampak kepemimpinannya terlihat pada berbagai bidang, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal, hingga pelestarian identitas budaya Minangkabau dalam bingkai pembangunan kota yang modern.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Amallia, N., Miranda, Z., & Perdana, M. H. G. (2025). Peran Kepemimpinan Transformasional dalam Reformasi Pelayanan Publik di Indonesia. *Urnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 3235–3241.
- Ardhana, V. Y. P. (2024). Konsep smart city dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan berkelanjutan. *Journal of Computer Science and Information Technology (JCSIT)*, 1(2), 69–74.
- Arisrianto, S., & Santosa, A. B. (2025). *Pengaruh PAD, DAU, DBH dan DAK terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2018-2023*. 22, 4641–4657.
- Cahaya, Alista, D., & Nurhayani, P. (2025). Kepemimpinan Transformasional dalam Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Sektor Publik : Kajian Literatur. *Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia*, 2(4), 28–37.
- Febriantina, S., Kimura, C., Nurkhairani, H., Bayu, M. F., Nugraha, P. A., & Primadhita, S. (2025). Literature Review : Teori-Teori Kepemimpinan (Modern dan Tradisional). *Journal of Student Research*, 3(5), 45–57.
- Hanifah, Z., & Frinaldi, A. (2025). INOVASI BUDAYA ORGANISASI DI SEKTOR PUBLIK: STRATEGI ADAPTASI TERHADAP DISRUPSI DIGITAL. *Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 296–305.
- Harsoyo, R. (2022). Teori Kepemimpinan Transformasional Bernard M . Bass dan Aplikasinya Dalam Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam. *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 3(2), 247–262.
- Irwansyah. (2024). *Tipologi Literature Review dalam Metode Penelitian*. Tim Mitra Cendekia Media.
- Nugroho, S. A., & Muslim, M. A. (2024). Transformational Leadership in Public Sector Innovation : A Bibliometric Analysis. *Asian Journal of Sosial and Humanities*, 2, 1321–1333.
- Rambe, R., & Abdurrahman, L. (2026). Evaluasi Implementasi Rencana Induk Kota Cerdas di Pemerintah Kota Indonesia melalui SLR. *Journal of Education Research*, 0738(1), 66–79.
- Salsabila, T. H., Indrawati, T. M., & Fitrie, R. A. (2024). Meningkatkan Efisiensi Pengambilan



- Keputusan Publik melalui Kecerdasan Buatan. *Journal of Internet and Software Engineering*, 1(2), 1–21.
- Sulistyaningsih, T., Purnama, R. A., & Kulsum, U. (2023). Smart City Policy : Strategy and Implementation to Realize Smart Urban Governance in Indonesia. *Journal of Governance and Public Policy*, 10(2), 105–117.
- Yosua, I. (2024). Tantangan dan Strategi Kepemimpinan Virtual di Indonesia. *JURNAL ILMU PERILAKU*, 8(1), 50–75.